



Studi arus utama merayakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai alat pemberdayaan ekonomi dalam pembangunan pedesaan. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa program-program CSR secara tidak proporsional menguntungkan elite pedesaan yang dominan—petani kapitalis dan tuan tanah—sementara meminggirkan kelas pekerja dan *petty commodity producers* (PCPs). Penelitian ini menggunakan observasi lapangan partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan tinjauan literatur untuk mengumpulkan data dari Jawa Tengah. Temuan empiris menunjukkan bahwa CSR terutama menguntungkan kelas penguasa desa yang sudah ada dengan infrastruktur yang diperluas dan ditingkatkan. Sebaliknya, sebagian besar PCP di desa menghadapi tekanan subsistensi. Fenomena ini mengakibatkan reklasifikasi PCP menjadi petani semi-proletar, yang sebagian besar disebabkan oleh inisiatif redistribusi lahan yang tidak terstruktur dengan baik terkait dengan program CSR. Sementara itu, kelas pekerja semakin terpinggirkan dan dieksploitasi karena kelas penguasa telah mengecualikan mereka dari manfaat langsung apa pun. Dinamika ini mengungkap peran CSR bukan sebagai mekanisme pembangunan yang netral, tetapi sebagai instrumen yang digunakan kelas penguasa pedesaan untuk mengonsolidasikan dominasi ekonomi, memperkuat pengaruh politik, dan mempertahankan kontrol atas tenaga kerja dan sumber daya. Akibatnya, studi ini berpendapat bahwa CSR di pedesaan Indonesia beroperasi sebagai alat strategis untuk mengonsolidasikan dominasi elite pedesaan dan mempertahankan ketimpangan.



Mainstream studies celebrate Corporate Social Responsibility (CSR) as a tool for economic empowerment in rural development. This study, however, demonstrates that CSR programs disproportionately benefit the dominant rural elite—capitalist farmers and landlords—while marginalizing the classes of labour and petty commodity producers (PCPs). This study uses participant field observations, semi-structured interviews, and a literature review to collect the data from Central Java. The empirical findings show that CSR primarily benefits the existing village ruling class with expanded and enhanced infrastructure. Conversely, most PCPs in the village face *subsistence squeeze*. This phenomenon resulted in the reclassification of PCPs into semi-proletarian farmers, largely attributable to inadequately structured land redistribution initiatives associated with CSR programs. Meanwhile, the labour classes have become increasingly marginalised and subject to exploitation since the ruling class has excluded them from obtaining any direct benefits. These dynamics unravel CSR's role not as a neutral development mechanism, but rather as an instrument that the rural ruling class uses to consolidate economic dominance, reinforce political influence, and maintain control over labour and resources. As a result, this paper argues that CSR in rural Indonesia is operate as a strategic tool for consolidating rural elite dominance and sustaining inequality.